TESIS

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020

(THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES IN MUNA IN 2020)

SRI NUR WAHYUNI

E012 171 020

PROGRAM PASCA SARJANA
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

TESIS

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020

(THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES IN MUNA IN 2020)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelai Magister
Program Studi Administrasi Publik

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

SRI NUR WAHYUNI

E012 171 020

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

TESIS

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh

SRI NUR WAHYUNI

Nomor Pokok : E012171020

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **25 September 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.	**Dr. Jayadi Nas, S.Sos, M.Si.**
Ketua	Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Prof. Dr. Hj. Nurlinah M, M.Si.	**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Sri Nur Wahyuni
Nomor Pokok Mahasiswa	: E012171020
Program Studi	: (S2) Administrasi Publik
	(Konsentrasi Pemerintahan Daerah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut,

Makassar, 25 September 2020
Yang Menyatakan,

Sri Nur Wahyuni

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020"**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-2 (S2) pada Program Studi Magister Pemerintah Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallalahu Alaihi Wassallam, yang menjadi suri tauladan untuk seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mudah dan tidak dalam waktu singkat. Selama penyusunan tesis ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat dan usaha yang keras serta dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah **Adi Prayitno** dan Ibunda **Sitti Pelita** yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini. Terima kasih karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang,

dukungan moral dan materi, semangat serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki serta kebahagiaan yang tak henti kepada beliau. Aamiin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program Strata-2 (S-2) Universitas Hasanuddin;
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si** selaku ketua Magister Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Jayadi Nas, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga tesis ini selesai.
5. Para tim penguji Ibu **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si,** Ibu **Prof. Dr. Rabina Yunus, dan** Bapak **Dr. Muhammad Yunus, M.Si,** yang telah

banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan Tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pascasarjana Magister Pemerintah Daerah yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis. Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si; Bapak Prof. Rasyid Thaha, M.Si; Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si; Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si; Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si; Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si; Dr. Jayadi Nas, M.Si; Bapak Dr. Muhammad Yunus, M.Si,; Bapak H. Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Andi Lukan Irwan, S.IP, M.Si.
7. Staf pegawai Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Pemerintah Kabupaten Muna yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Muna. Terkhusus untuk Ketua Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, pelaku Industri Kecil dan Menengah dan Tokoh masyarakat lainnya.
9. Terima Kasih kepada saudara kandung penulis, Dwi Nur Anindya yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan ayah dan ibu.
10. Terima kasih kepada kakek dan nenek penulis, Laode Bolombo dan Waode Ido, terima kasih atas segala doa kalian.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Magister Pemerintahan Daerah Angkatan 2017, Risnaldi, Asriani Amir, Muh. Amril Pratama, Dandi Darmadi, Febriyanty Fajry, Karina, A. Nurul

Afana, M. Akbar, Sutrisno, Mujaddid Ridha, Hasri As, Iin Nurfadillah, Asdi Sutriadi, Fadhillah Ainun Nisa, Ana Mustika H. Alidin, Andi Siti Sri Hutami, Resky Wahyuni R, Sitti Nurhasah Furqani, Nur Willy, Lifia Anis Thara Andi Lantara. Terutama **Afni Amiruddin** yang selalu membantu dan memberikan masukan kepada penulis

12. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Fraternity. Terima kasih atas segala kenangan dan pelajaran yang kalian berikan selama ini dan buat uchi yang selalu membantu dan membimbing. ***Terkhusus kepada Sita, Tari, Willy dan Lifia,*** terima kasih untuk setiap waktu yang telah kita lalui, canda tawa bahkan tangis yang pernah ada akan selamanya menjadi kenangan yang indah. Semoga kita akan menemui kesuksesan masing-masing kelak di masa depan.
13. Terima Kasih Kepada Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, Renessaince 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightment 2011 yang telah memberikan banyak pelajaran. Dan Penulis Titipkan Rumah Jingga kepada Adinda Lebensraum 2013, Fidelitas 2014 dan Federasi 2015. Jayalah Himapemku Jayalah Himapem Kita. Salam Merdeka Militan !
14. Terima kasih kepada sahabat kampus UMI penulis yaitu Lulu, Sisma, Dhani, Kiki dan Uli yang senantiasa mendampingi dan mendoakan.

15. Terima kasih kepada sahabat penulis yaitu Nia Hamsah, Muna Hijriana, Fauziah Faniawati dan Amelia Annisa yang senantiasa mendoakan.
16. Terima kasih kepada keluarga penulis selama penelitian yaitu bapak samahu, bibi dewi sartika, paman laode awal jaya bolombo SH. dan la jami yang telah mendampingi, membantu dan mendoakan selama penyusunan tesis ini.
17. Terima Kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, pelajaran dan kenangan yang telah kalian berikan. Semoga penulis mampu membahagiakan kalian.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Makassar, September 2020
Penulis
SRI NUR WAHYUNI
E 012 171 020

ABSTRAK

SRI NUR WAHYUNI. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020 (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan Jayadi Nas).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis upaya peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Muna tahun 2020 beserta faktor yang mempengaruhi pemberdayaan IKM tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang akan memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pemerintah Kabupaten Muna belum maksimal dalam memberdayakan Industri Kecil Menengah. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya sentra Industri Kecil Menengah yang merupakan lokasi pusat industri sejenis dengan menggunakan bahan baku dan alat yang sejenis dan dari 24 (dua puluh empat) industri hanya 1 (satu) Unit Pelaksana Tugas 1 yang berjalan yakni Sentra Tenun. Tenaga penyuluh yang memberikan bantuan informasi dan pelatihan serta bimbingan teknis hanya kepada Industri pertenunan dan industri furniture dan bahan bangunan lainnya. Sementara pemberian modal usaha kepada para Industri Kecil Menengah tidak berjalan lancar dan belum adanya kemitraan yang terjalin. Hal ini berdampak pada tidak terciptanya industri hijau di Kabupaten Muna. (2) Peran pemerintah dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Muna dipengaruhi faktor pendukung yakni ketersediaan sarana dan prasarana, kemitraan, dan partisipasi masyarakat dan faktor penghambat adalah anggaran. Anggaran yang minim sehingga implementasi dari setiap program tidak berjalan baik. Hal ini membuat target pemerintah dalam mengembangkan 2 (dua) Industri Kecil Menengah dalam beberapa tahun ini tidak maksimal.

Kata Kunci : Industri Kecil Menengah, Kabupaten Muna

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN PUSAT BAHASA 29/7 2020

ABSTRACT

SRI NUR WAHYUNI. The Role Of Local Government In Empowering Small And Medium Industries In Muna In 2020. (Supervised by Juanda Nawawi & Jayadi Nas).

The study aims to describe and analyze the efforts of the role of the Regional Government in the empowerment of Small and Medium Industries in Muna Regency in 2020 along with the factors that influence the empowerment of the Small and Medium Industries.

The resears approach is qualitative which will provide a factual overview of the research purpose.

The results showed: first, Muna District Government was not maximized in empowering the Small and Medium Industries. This can be seen from the absence of the Small and Medium Industries centers which are the locations of similar industrial centers using raw materials and similar equipment and from 24 (twenty four) industries only 1 (one) Task Excecution Unit which runs namely Sentra Tenun. Extension workers who provide information and training assistance and technical guidance only to the weaving industry and the furniture and other building materials industry. While the provision of venture capital to Small and Medium Industries is not going well and there is no partnership. This has an impact on not creating a green industry in Muna Regency. Second, The role of the government in empowering Small and Medium Industries in Muna Regency is influenced by supporting factors namely the availability of facilities and infrastructure, partnerships, and community participation and the inhibiting factor is the budget. The budget is minimal so that the implementation of each program is not going well. This makes the government's target in developing 2 (two) Small and Medium Industries in a number of years not optimal.

Key Words : Small and Medium Industries, Muna Regency

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PUSAT BAHASA

DAFTAR ISI

SAMPUL *i*

LEMBAR PENGESAHAN *iii*

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS *iv*

KATA PENGANTAR *v*

ABSTRAK *x*

ABSTRACT *xi*

DAFTAR ISI *xii*

DAFTAR TABEL *xvi*

DAFTAR GAMBAR *xvii*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 11

2.1.1. Tinjauan Tentang Peran 11

2.1.2. Tinjauan Tentang Pemerintah 14

2.1.3. Tinjauan Tentang Pemberdayaan 23

2.1.4. Tinjauan Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 33

2.1.5. Tinjauan Tentang Renstra (Rencana Strategis) 43

2.1.6. Tinjauan Tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM) 46

2.2. Penelitian Terdahulu 53

2.3. Kerangka Pikir 63

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 67

3.2. Lokasi Penelitian 69

3.3. Informan Penelitian 69

3.4. Jenis dan Sumber Data 70

3.5. Teknik Pengumpulan Data 71

3.6. Fokus Peneitian 72

3.7. Teknis Analisis Data 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Muna 77

4.1.1. Sejarah Kabupaten Muna 77

4.1.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 78

4.1.2.1 Letak Geografis 78

4.1.2.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 79

4.1.3. Visi Misi Kabupaten Muna 84

4.1.3.1 Visi Kabupaten Muna 84

4.1.3.2 Misi Kabupaten Muna 88

4.1.3.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muna 101

4.1.3.4 Perioritas Pembangunan Kabupaten Muna 114

4.1.3.5 Program Khusus Lintas Bidang Kabupaten

Muna 117

4.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam pembangungan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 118

4.3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020 120

4.3.1. Menciptakan Suasana Iklim yang Memungkinkan Potensi Masyarakat Berkembang 123

4.3.2. Memperkuat Potensi atau Daya yang Dimiliki Masyarakat 141

4.3.3. Melindungi Masyarakat Melalui Menciptakan Kawasan Industri Hijau 153

4.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020 157

4.4.1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 158

4.4.2. Ketersediaan Anggaran 160

4.4.3. Kemitraan 162

4.4.4. Partisipasi dari Masyarakat 162

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 168

5.2. Saran 171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sektor ekonomi unggulan Kabupaten Muna 6

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Muna Tahun 2018 79

Tabel 3. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muna 81

Tabel 4. Perumusan Penjelasan Visi 85

Tabel 5. Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi, dan Penjelasan Misi 88

Tabel 6. Banyaknya Industri, Nilai Produksi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Kabupaten Muna Tahun 2017 124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep 66

Gambar 2. Peta Kabupaten Muna 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[1]

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

[1]HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah",* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003*,* Hlm 1.

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam mengembangkan perikehidupan mereka.

Pemberdayaan pada dasarnya juga akan membawa masyarakat untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil, yang akan memberikan peluang hidup dan berkembang bagi industri Kecil dan Menengah. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan

jangka panjang bagi kepentingan ekonomi secara keseluruhan dan masyarakat. Dalam kehidupan ekonomi yang demikian, kedudukan Industri Kecil dan Menengah yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat sangat penting.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. IKM menjadi sektor yang penting di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Selain itu, IKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekspor dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku cadang bagi perusahaan besar. Dalam sebuah pernyataan Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam siaran persnya mengatakan :

> “IKM konsisten sebagai penopang perekonomian Indonesia, bahkan menjadi salah satu sektor industri yang mampu berdiri tegak pada saat krisis moneter global, Berdasarkan catatan Kemenperin, industri kecil pada tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha, naik menjadi 4,49 juta unit usaha di semester I tahun 2018. Artinya, ada penambahan hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun belakangan ini. Ketika mencapai 4 juta unit IKM di tahun 2016, tenaga kerja yang terserap lebih dari 10 juta orang. Tentunya, jumlah tersebut mendominasi dari populasi tenaga kerja industri di Indonesia.[2]

[2] http://jogja.tribunnews.com/2018/11/14/industri-kecil-dan-menengah-jadi-tulang-punggung-ekonomi-nasional

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengembangakan IKM di daerahnya sebagai salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita menyadari bahwa pengembangan IKM di daerah sangat erat kaitannya dengan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diimplementasikan semenjak tahun 2001 menyebabkan daerah memiliki kesempatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mengelola penggunaan sumber daya berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya, termasuk mengatur IKM daerah. Basis kegiatan IKM di daerah adalah rakyat kecil. Karena itu IKM merupakan salah satu pondasi penting dalam perekonomian nasional, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih banyak pada pengembangan IKM. Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

Potensi yang dimiliki masing-masing daerah merupakan kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan daerah dan mencapai tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional secara umum. Pengelolaan sumber daya lokal yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas wilayah secara umum, karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wujud dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu adalah terlaksananya pembangunan yang merupakan

suatu proses berkelanjutan guna mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Berbagai usaha selalu dijalankan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi dan sumber daya serta keterbatasan yang ada. Besar atau kecilnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan pendayagunaan kemampuan lokal dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat dalam pembangunan. Hasil pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan di bidang ekonomi saja tetapi juga untuk tujuan – tujuan lainnya yang berdampak luas seperti berlangsungnya proses industrialisasi di daerah.

Sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan hasil alam, Kabupaten Muna memiliki potensi untuk memberdayankan IKM. Berbagai industri kecil dan menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Muna merupakan hasil dari tinggi nya potensi hasil kekayaan alam yang dimiliki daerah.

Tabel 1. Sektor ekonomi unggulan Kabupaten Muna

NO	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)			
		Muna	Sultra	LQ	Kriteria
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	1.657,67	25.876,88	1,16	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	591,86	22.227,42	0.48	Non Basis
3	Industri Pengolahan	311,45	6.592,34	0,86	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	44,78	0,88	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur ulang	17,8	194,81	1,66	Basis
6	Konstruksi	763,27	14.345,87	0,97	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran	784,96	13.481,62	1,06	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	168,6	4.849,62	0,63	Non Basis
9	Penyediaann Akomodasi dan Makan Minum	30,74	640,98	0,87	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	59,22	1.984,43	0,54	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	126,22	2.629,88	0,87	Non Basis
12	Real Estate	131,82	1.601,74	1,49	Basis
13	Jasa Perusahaan	4,38	219,35	0,36	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	628	5.532,16	2,06	Basis
15	Jasa Pendidikan	415,96	4.875,37	1,55	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90,16	977,08	1,67	Basis
17	Jasa Lainnya	137,04	1.395,85	1,78	Basis

Sumber : Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara dalam angka tahun 2017 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor basis yang menjadi pendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Muna adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; real estat; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa

kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis LQ bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai lebih tinggi di bandingkan sektor basis lainnya. Dari 18 sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Sulawesi Tenggara terdapat 8 sektor yang menjadi basis (unggul) di Kabupaten Muna.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Muna terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; real estat; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis LQ bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai lebih tinggi di bandingkan sektor basis lainnya. Dari 18 sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Sulawesi Tenggara terdapat 8 sektor yang menjadi basis (unggul) di Kabupaten Muna.

Potensi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat Kabupaten Muna untuk membentuk IKM yang kemudian harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Disamping itu, Industri kecil menengah selain dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat daerah, Industri kecil menengah juga dapat meningkatkan dan mengembangkan laju perekonomian daerah serta pengelolaan terhadap sumber daya alam yang ada dapat terkendali.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020**".

1.2 Rumusan Masalah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karena memberikan dampak ganda terhadap perekonomian lokal dan nasional serta dapat menghasilkan devisa. Peranan industri kecil dan menengah sangat strategis dalam menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan sektor industri harus dilakukan secara berkelanjutan dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Dari 18 sektor ekonomi yang menjadi unggulan di Sulawesi Tenggara terdapat 8 sektor yang menjadi basis (unggul) di Kabupaten Muna.. Hal ini memberikan potensi besar terhadap pemberdayaan IKM di Kabupaten Muna. Banyaknya potensi yang dimiliki Kabupaten Muna mulai dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; real estat; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Pemberdayaan dari potensi yang dimiliki harus diiringi dengan peran pemerintah daerah dalam bentuk program kerja untuk mendukung pemberdayaan Industri Kecil Menengah, sehingga dapat memberikan potensi pendapatan bagi daerah Kabupaten Muna. Maka dari uraian tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020.

2. Menganalisis Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Muna Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM di Kabupaten Muna.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam keselarasan implementasi rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pemberdayaan industri kecil mengengah (IKM) di Kabupaten Muna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk membahas masalah penelitian sekaligus menjadi landasan teori dan konsep dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori dan konsep dari Peran, Perencanaan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Dan Industri Kecil Menengah (IKM). Teori dan konsep dari Peran dan Pemberdayaan akan menjadi landasan bagi penulis dalam melihat keterkaitannya terhadap peran Pemerintah di daerah Kabupaten Muna dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil Menengah.

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Tentang Peran

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (*actor*) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga)

menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan[3].

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi[4].

Merton dalam Raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu[5]. Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan masyarakat. Scott et al. dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai berikut:

---

[3] Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, EdisiBaru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, Hlm 243.
[4] Miftah, Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm 80.
[5] Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pusaka, 2007,Hlm 67.

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja *(task behavior)*, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran sulit dikendalikan *(role clarity dan role ambiguity)*
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan *(jobs)* tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran[6].

Dari uraian beberapa teori peran dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang atau suatu lembaga yang memilki kedudukan tertentu dalam melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuannya baik tertulis dalam sebuah dokumen ataupun dalam bentuk tidak tertulis yang berupa norma norma dalam masyarakat. Peran lebih mengarah pada tindakan positif atau perubahan ke arah yang lebih baik sehingga sekelompok masyarakat atau lembaga tertentu menuntut peran tersebut dalam terlaksana dengan baik.

---

[6] Kanfer, R, *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants.* Journal of Social and Clinical Psychology, 1987, Hlm. 197.

2.1.2. Tinjauan Tentang Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ndraha menyebutkan tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada dua macam fungsi pemerintah yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Maksudnya disini fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin meningkat fungsi primer pemerintah.

Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan (*serving*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan *negative* dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, maksudnya semakin tinggi taraf hidup maka semakin kuat *bargaining position*, dan semakin *integrative* masyarakat yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari *rowing* ke *steering*. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Oleh sebab itu, konsep *development* tidak dikenal di negara maju, tetapi populer di negara berkembang[7].

Menurut Siagian, ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya :

[7] Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2* Rineka Cipta, Jakarta. 2003, hlm 75-76.

1. Pemerintah sebagai stabilisator

Salah satu ciri dari suatu negara yang sdang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan poliyik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. Dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil.

2. Pemerintah sebagai innovator

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, system baru, serta cara berpikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut.

3. Pemerintah sebagai modernisator

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cara memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju kehidupan modern.

4. Pemerintah sebagai pelopor

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang

positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun, juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, contohnya adalah penanggungan bagi orang miskin dan terlantar[8].

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurusi jalannya roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan

[8] Siagian, Sondang P*, Teori dan Praktek Kepemimpinan*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm 142.

dalam arti luas selain ekskutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.”[9]

Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/ kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Seperti di negara kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di daerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya seperti ditingkat pusat/nasional yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan

[9] Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju. 2013. Hal 4

negara untuk mengurus urusan pemerintahan ‘tertentu’ menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.[10]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

> “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

> “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah

[10] Sufianto, Dadang. (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Bandung:Alfabeta. Hal. 2223.

sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri.

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi berarti kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakaan pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya.

Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J. Oppenheion adalah :

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada negaranya.
2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan- kepentingan tersebut.

5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.[11]

Selanjutnya, menurut Yeti dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.

2. Ketersediaan anggaran

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari

[11]Utama, Prabawa. 1991. *Pemerintah Di Daerah*. Jakarta: Indhillco, hal 11.

pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai coordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

3. Kemitraan

Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik *(good governance).*

4. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari beberapa teori terkait Pemerintah Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab secara penuh dalam mengelola potensi daerah masing-masing yang dalam hal ini terkait Industri Kecil Menengah (IKM). Maka pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pemberdayaan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Muna. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang berperan sebagai pemeran utama dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Muna. Selain itu, peran pemerintah yang akan menjadi landasan penelitian ini diambil dari pendapat Yeti yang mengemukakan jika peran pemerintah dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi dari masyarakat. Lima peran tersebut kemudian menjadi dasar peneliti dalam menentukan faktor pendukung dan pendukung pemerintah dalam mengelola IKM di Kabupaten Muna.

2.1.3. Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *'power'* (kekuasaan atau

keberdayaan), karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.[12]

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.[13]

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya

---

[12]Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. PT. Refika Aditama, 2005, Hlm. 57.
[13]*Ibid,* hlm 59-60.

keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara.

Wuradji dalam Aziz Muslim pemberdayaan adalah :

> "Sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan"[14].

Adapun defenisi lain mengenai pemberdayaan adalah :

> "Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya".

Tahapan pemberdayaan yang diungkapkan oleh Prijono dan Pranaka:

1. Tahap inisiasi, yakni pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat.
2. Tahap partisipatoris, yakni pemberdayaan dari pemerintah bersama rakyat, dan untuk rakyat.
3. Tahap emansipatoris, yakni pemberdayaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Mubyarto, yaitu :

> "Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan

[14] Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat,* Yogyakarta, Penerbit Teras, 2009, hlm 3.

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya."[15]

Friedman mengemukakan, munculnnya konsep pemberdayaan atau *empowerment* karena dua hal yakni kegagalan dari harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat dari adanya alternatif-alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Menurut Friedman dalam Harjanto kegagalan dari harapan bukan merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai normatif dari moral. Kegagalan dari harapan akan merasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah hanya gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat hakekatnnya merupakan nilai kolektif dari pemberdayaan individual[16].

---

[15] Sun'an, Muammil & Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal. 120

[16] Herjanto, Eddy, *Manajemen Operasi Edisi Ketiga*, Jakarta, Grasindo, 2008, hlm 24.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan mengandung arti,

> "Pemberdayaan masyarakat mengandung tiga pengertian, yaitu; Pertama, pemihakan atau memberi perioritas kepada yang paling memerlukan; Kedua, mempersiapkan kepada masyarakat yang memperoleh perioritas dalam upaya manyamakan level (*level playing field*) dan; Ketiga melindungi segenap pelaku pembangunan khususnnya masyarakat yang mempunyai prioritas diberdayakan"[17].

Menurut Kartasamita, pemberdayaan masyarakat mengandung arti:

> "upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang salam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalakan pada kekuatan dirisendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga memberdayakan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat.dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakt haruslah pertamatama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah dengan pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinnya tidak ada masyarakat sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan nmendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinnya serta berupaya untuk mengembangkannya"[18].

Lebih lanjut Kartasasmita menambahkan bahwa:

> "pemberdayaan pada hakekatnnya berada pada diri manusia, sedangkan faktor luar manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnnya semangat, rasa dorogan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinnya sendiri,

---

[17] Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta, IDEA, 2000,hlm 4.

[18] Kartasasmita, G, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, CIDES, 1996, hlm 144

untuk mengendalikan dirinnya sendiri, untuk mengembangkan dirinnya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinnya”[19].

Pemberdayaan menurut Sedarmayanti merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan, dan peningkatan secara terus menerus[20].

Edi Suharto mengemukakan pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu :[21]

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupa mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.

---

[19] Ibid, hlm 152.
[20] Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusiadan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Mandar Maju, 2001, hlm 81.
[21] *Ibid* hlm 67-68.

5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu :

1. Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, menunjukan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri."[22]

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

> "Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau

[22] Hikmat, R. Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora Utama Press, 2001, Hlm. 89.

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana kegiatan".[23]

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu :

"***Pertama***, menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki. ***Kedua***, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya. ***Ketiga***, melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah".[24]

Kemudian, secara singkat Michael mengemukakan pendapatnya yang ia sebut "Rencana Permainan Pemberdayaan" yang merangkum tiga kunci menuju pemberdayaan, yakni:

"Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola sendiri untuk menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan budaya pemberdayaan."[25]

---

[23] Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pres, 2009, hal.66.

[24] Zubaedi. *Wacana Pengembangan Alternatif*, *Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2007, hal.103.

[25] Blanchard, Ken, et. Al, *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*, Batam Centre. Interaksara, 2004. Hal. 218.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi merumuskan strategi pemberdayaan melalui :

1. Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan Sistem Ekonomi Pancasila .
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar.
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju) dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM)."[26]

Pemberdayaan menurut Anwas yaitu Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat untuk berdaya, yang dilakukan secara demokratis agar dapat membangun diri serta lingkungannya guna meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera[27].

Tujuan adanya pemberdayaan antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)
2. Perbaikan usaha (*better business*)

---

[26] Ali, Faried, dkk, *Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Bandung, Refika Aditama, 2012, Hal. 115.
[27] Anwas, O. M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2003, hlm 20.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)
5. Perbaikan kehidupan (*better living*) [28]

Menurut Sumodiningrat sebagaimana dikutip oleh Mashoed mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah :

1. Bantuan dana sebagai modal untuk usaha.
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung dalam pengembangan sosial ekonomi rakyat.
3. Penyediaan sarana untuk dapat mempelancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan yang ditujukan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi bagi masyarakat[29]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya mendorong individu maupun kelompok untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga individu maupun kelompok mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari kedepannya. Melalui pemberdayan, kegagalan pada sistem terdahulu akan mengalami perubahan untuk mencapi tujuan atau

---

[28] Aprillia Theresia dkk, 2004, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm 253-254.
[29] Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta, IDEA, 2000, hlm 40.

harapan dari sistem yang dibuat. Pemberdayaan dimaksudkan guna mengembangkan seseorang atau kelompok atau lembaga melalui tahap-tahap perubahan seperti inisiasi, partisiaptoris, dan emansipatoris. Melakukan pemberdayaan perlu adanya pendekatan sehingga seseorang atau kelompok atau lembaga dapat berpartisipasi langsung seperti pendekatan pemungkin, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Melalui pemberdayaan ini kemudian diharapkan mampu menciptakan perbaikan pada kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan dan kehidupan.

2.1.4. Tinjauan Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Rencana atau *plan* adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku diseluruh lapisan organisasi sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.

Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki *intermediate time frame*.[30]

Perencanaan merupakan susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni : (1) apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi; (2) bagaimana mencapai hal tersebut; (3) siapa yang akan melakukan; (4) lokasi aktivitas; (5) kapan akan dilakukan, berapa lama; dan (6) sumber daya yang dibutuhkan.

Sesuai dengan pendapat di atas, Tjokroamidjojo mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa

[30] https://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan

perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siap[31].

Menurut Tjokroamidjojo terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, yakni :

1. Permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
2. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
3. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan[32].

Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha , produsen , metode dan jawdal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian maka

[31] Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Masagung, 1992, hlm 14.
[32] Ibid, hlm 38.

perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan , bagaimana , bilamana dan oleh siapa.

Selanjutnya Perencanaan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik menjadikan kegiatan pembangunan daerah :

1. Dilaksanakan secara sistematis, terarah sesuai dengan tujuan pembangunan dan berkelanjutan.
2. Lebih efisien di dalam penggunaan dana, tenaga dan sumber daya yang lain pada setiap kegiatan.
3. Lebih tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan daerah dan pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang lain untuk tetap mendukung kesejahteraan.
4. Memiliki dasar-dasar untuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Memiliki sarana untuk mencatat dan menilai pelaksanaan dan manfaat kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan tidak berarti hanya pembuatan proyek-proyek atau pengesahan usulan proyek atau kegiatan, dan juga bukan hanya untuk membagi-bagi dana dan sarana yang disediakan untuk pembangunan daerah.Secara teknis, perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut :

1. Persiapan Perencanaan.
2. Pengumpulan dan analisis data.
3. Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan (visi pembangunan total).
4. Penentuan Strategi pembangunan daerah.
5. Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sector pembangunan.
6. Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada setiap sasaran pada setiap sektor.
7. Penentuan tahapan-tahapan pembangunan dan hasil yang ingin dicapai pada setiap tahapan pelaksanaan (visi temporal) baik secara keseluruhan maupun pada setiap sektor.
8. Penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai urutan prioritas pelaksanaan pada setiap sector.
9. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
10. Penetapan rencana pembangunan daerah dalam peraturan daerah (PERDA) menjadi Program Pembangunan daerah (PROPEDA) dan penjabaran untuk pelaksanaannya[33].

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan bahwa ”perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”. Pengertian

[33] Wiroatmodjo, Piran*, Dasar Penelitian dan Statistik*, Jakarta, UI, 2010, hlm 42.

perencanaan juga terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengertian perencanaan sama dengan yang terdapat pada UU No.25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menurut pendapat Salusu, 1998: 500 Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk mengurangi risiko, suatu intrumen untuk mendidik para manajer, para pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-kepala unit kerja selain itu pula adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategic atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis, serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya semua unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Perencanaan strategis juga dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan mereka mempunyai dampak terhadap masa depan organisasi dengan cara yang konsisten dan rasional[34].

Perencanaan strategis bagi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai suatu yang dapat digunakan oleh para pemimpin pemerintahan untuk membayangkan, menvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, produser, operasionalisasi, serta

[34] Salusu J, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta: Grasindo, 1998, hlm 501.

pengendalian sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan itu.

Perencanaan strategis dalam setiap organisasi harus bersifat responsif terhadap segala bentuk perubahan lingkungan organisasi yang terjadi. Apabila perencanaan strategis itu kurang responif, maka organisasi yang bersangkutan akan kesulitan menentukan visi dan misi bahkan tujuan organisasi sekalipun. Perencanaan strategis merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi paling depan sampai pada tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan[35].

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ”Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan

[35] Muljadi, *Pokok-pokok dan Ikthisar Manajemen Stratejik PerencanaanDanManajemen Kinerja*,Penerbit Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, Hlm 2.

tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Mengacu pada UU 25 tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategis

   RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang , bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Demokratis dan Partisipatif

   Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan , akuntabel , dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3. Politis

   Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik , terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4. Perencanaan Bottom-up

   Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemerintah daerah meliputi : pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD , yaitu

1. Alur Proses Strategis

   Alur Proses Strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

2. Alur proses partisipatif

Alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakholder LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

3. Alur Legislasi dan Politis

Alur Legislasi dan Politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.[36]

Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

Adapun cakupan Penyusunan RPJMD, yaitu

1. Proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan.

[36] http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-rpjmd.html

2. Proses identifikasi dan analisis kondisi, potensi SDA, SDM dan berbagai asset baik tangible assets (hardware) maupun intangible assets (software) yang dimiliki Pemerintah Daerah.
3. Proses formulasi kebijakan indikatif (policies formulation) untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun mendatang.
4. Penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan.
5. Perumusan program lintas kewilayahan dalam Pemerintah Daerah termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat indikatif untuk 5 tahun mendatang.[37]

2.1.5. Tinjauan Tentang Renstra (Rencana Strategis)

Renstra (Rencana Strategis) adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD.
2. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun.

[37] http://speunand.blogspot.com/2012/03/kebijakan-perencanaan-daerah-rpjpd

3. Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.
4. Renstra SKPD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.
5. Renstra SKPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga.

Adapun Proses Penyusunan Renstra yaitu :

1. Setiap SKPD wajib melakukan penyusunan Renstra dengan mengacu pada RPJM Daerah.
2. Penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau Bapekab.
3. Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD.
4. Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda.

Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD:

   Substansi utama memuat visi dan misi SKPD, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif.
2. Sistematika Renstra SKPD:

   a. Pendahuluan

b. Gambaran Pelayanan SKPD

c. Isu-isu Strategi berdasarkan Tupoksi

d. Visi, Misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

e. Rencana Program kegiatan Indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif

f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Pasal 93 Permendagri 54/2010).

3. Penyempurnaan Renstra SKPD :

a. Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi dan program Gubernur terpilih).

b. Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.

c. Penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.[38]

4. Perencanaan Daerah

a. Perencanaan ekonomi daerah disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan ekonomi nasional.

b. Berdasarkan dimensi waktu terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek (tahunan).

[38] http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-renstra.html

c. Dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

5. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) = 20 tahun.
   b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) = 5 tahun.
   c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) = 5 tahun.
   d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) = 1 tahun.
   e. Rencana Kerja (RK-SKPD) = 1 tahun

2.1.6. Tinjauan industri Kecil Menengah (IKM)

Pengertian industri kecil menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia yaitu: “Usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.”. Adapun industri kecil oleh Kamar Dagang dan Industri adalah usaha industri yang memiliki modal kerja kurang dari Rp. 150.000.000,- dan memiliki nilai usaha kurang Rp. 600.000.000,-.

Berbeda dengan pengertian di atas batasan dari industri kecil yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5

sampai 19 orang. Selanjutnya pengertian industri yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan industri oleh Pemerintah adalah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Badan Pusat Statistik kedua industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan indutsri menengah dapat dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dianggap bisa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan hanya kegiatan yang sederhana dan menghasilkan output yang terbatas. Sedangkan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih rumit dan menghasilkan output yang lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan jika jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.

Pengertian industri kecil menurut Marbun yaitu:

> "Merupakan perusahaan yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern dengan tenaga-tenaga profesional".

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert industri kecil adalah:

> "Bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat atau secara lokal, sering kali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit dan bekerja di satu lokasi".

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam RIPIKM (2002-2004) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa[39].

Berbagai usaha kecil yang terdapat di Indonesia dapat digolongkan menurut bentuk-bentuk, jenis serta kegiatan yang dilakukannya. Pada hakikatnya usaha kecil yang ada secara umum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan khusus yang meliputi:

1. Industri Kecil

   Misalnya: Industri kerajinan rakyat, Industri cor logam, konveksi dan berbagai industri lainnya.

2. Perusahaan Berskala Kecil

   Misalnya: Penyalur, toko kerajinan, koperasi, waserba, restoran, toko bunga, jasa profesi dan lainnya.

3. Sektor Informal

   Misalnya: Agen barang bekas, kios kaki lima, dan lainnya.

Sedangkan jenis industri kecil dapat dikategorikan berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha kecil, berbagai ragam dan jenis usaha kecil yang dikenal meliputi:

1. Usaha Perdagangan Keagenan: agen koran dan majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Pengecer: minyak, kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, dan lain-lain. Ekspor/ Impor: berbagai produk local

[39] Adi, Prasetyo,.“*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Kaffah Yogyakarta*”, Surakarta, Skripsi FE STAIN. 2008

atau internasional. Sektor Informal: pengumpulan barang bekas, kaki lima dan lain-lain.

2. Usaha Pertanian : Pertanian pangan maupun perkebunan: bibit dan peralatan pertanian, buah-buahan, danlain-lain. Perikanan Darat/Laut: tambak udang, pembuatan krupuk ikan dan produk lainyang berasal dari perikanan darat maupun laut. Peternakan dan usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan Departeman Pertanian: produsen telur ayam, susu sapi dan lain-lain produksi hasil peternakan.
3. Usaha Industri : Industri logam/ Kimia: pengrajin logam, perajin kulit, keramik, fiberglass, marmer dan lain-lain. Pertambangan: bahan galian, serta aneka industri kecil pengrajin perhiasan, batu-batuan dan lain-lain. Konveksi: produsen garment, batik, tenun ikat dan lain-lain.
4. Usaha jasa Konsultan: Konsultan hukum, pajak, manajemen, dan lain-lain. Perencana: perencana teknis, perencana sistem, dan lain-lain. Perbengkelan: bengkel mobil, elektronik, jam dan lain-lain. Transportasi: travel, taxi, angkutan umum, dan lain-lain. Restoran: rumah makan, coffee-shop, cafetaria, dan lain-lain.
5. Usaha Jasa Konstruksi : Kontraktor bangunan, jalan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan teknis konstruksi bangunan.

Industri kecil pada umumnya memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian. Namun demikian, secara historis struktural pola pertumbuhan industri kecil menimbulkan kondisi yang kurang baik. Masalah utama yang terjadi adalah dualisme ekonomi yang makin lebar dan dikotomi industri berskala besar dan kecil.

Pemberdayaan industri tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pembangunan serta pemberdayaan industri kecil dan industri menengah agar dapat mewujudkan industri yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja serta dapat menghasilkan barang dan jasa industri untuk dapat ekspor. Sebagaiman telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2014 pasal 72 bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta memberikan fasilitas bagi industri.

Sedangkan peran disini yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Finansial
2. Pengembangan Pemasaran Dalam hal ini terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:
    a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar
    b. Proteksi pasar

c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian, yaitu
    a. Pengaturan dan Perijinan
    b. Perencanaan Tata Ruang
    c. Fungsi Kelembagaan[40]

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa industri kecil adalah usaha sekelompok orang yang jumlahnya sedikit dengan omset kecil dan pengerjaan yang mudah. Kategori industri kecil digolongkan dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, jumlah tenaga kerja lebih banyak dan omset atau ouput yang dihasilkan cukup besar. Industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya.

[40] Azwar, Saifudin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya Edisi Kedua*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1995, Hlm 6675.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi penting untuk dikemukakan dalam halaman ini, mengingat dari segi akademik penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangsi pengetahuan pada khasanah kajian ilmu pemerintahan daerah untuk pengembangan keilmuan, khususnya kajian mengenai Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM di Kabupaten Muna

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Peneletian	Penelitian Saat ini
1.	Sukatno	Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan	Metode penelitian ini yakni metode kualitatif-deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan mengapa implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang Studi Kasus Sentra Industri Tas di Kecamatan Petir belum optimal karena ketidak jelasan SOP, terbatasnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang	Perbedaan dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sukatno mahasiswa jurusan ilmu administrasi Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tentang Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus Pengembangan Sentra Industri Kecil Tas di Kecamatan Petir). Pada penelitian terdahulu penulis melihat mengapa

		Petir).		belum cukup, akses sumber permodalan yang masih terbatas, belum adanya UPT dan pihak ketiga sebagai pengembangan bisnis, sosialisasi dan koordinasi yang belum masif. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah daerah menegaskan kembali SOP untuk pengembangan sentra industri kecil, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,	implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Serang Studi Kasus Sentra Industri Tas di Kecamatan Petir belum optimal. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yang akan menganalisis bagaimana rencana strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan industri kecil menengah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Pada penelitian

				menambah fasilitas industri pendukung, membentuk koperasi sebagai sumber permodalan, Pemerintah Kabupaten Serang membentuk UPT dan bekerja sama dengan Pihak ketiga sebagai pengembangan bisnis, dinas terkait memasifkan sosialisasi dan koordinasi program pengembangan sentra industri kecil.[41]	terdahulu oleh Sukatno dilakukan di kabupaten Serang, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten Muna.

[41] http://repository.fisip-untirta.ac.id/758/1/COVER-LAMPIRAN%20-%20Copy.pdf

2.	Rahmat Adriyan Us	Dampak Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah di Kota Bandar lampung Tahun 2014	Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis dampak. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknis analisis data menggunakan teknik kualitatif verifikatif. Penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan IKM secara umum terdampak positif terhadap perkembangan IKM yaitu kegiatan untuk industri batik, sulam usus dan ikan olahan. Akan tetapi dampak sebaliknya dirasakan oleh industri emping melinjo dikarenakan materi yang tidak aplikatif dan minim unsur kebaruan.	Perbedaan dari penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Rahmat Adriyan Us, Mahasiswa Program Studi ilmu administrasi negara Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian Dampak Program Pengembangan Industri Kecil dan Menegah di Kota Bandar lampung Tahun 2014. Dimana industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bandar lampung sebagai penyokong utama perekonomian kota dengan menyumbangkan lebih

			dibatasi pada program serta kegiatan dengan beberapa karakteristik yaitu kegiatan yang sifatnya adalah intervensi secara langsung kepada IKM, merupakan kegiatan berkelanjutan	Sedangkan untuk kegiatan fasilitasi kerjasama IKM dengan swasta tidak berdampak positif dikarenakan syarat kerjasama yang ditawarkan oleh swasta tidak dapat dipenuhi oleh IKM. Sementara itu untuk kegiatan promosi produk UMKM termasuk IKM, dampaknya positif berdasarkan beberapa faktor yaitu frekuensi sering-	dari 23,59% atau 1/5 dari total Produk Domestik Regional Bruto pada 2012. Akan tetapi, justru tidak menjadi prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal maksimalisasi potensi daerah. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yang akan menganalisis bagaimana rencana strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan industri kecil menengah dengan

			dalam rangka kebijakan pengembangan IKM jangka menengah sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, serta terfokus hanya terhadap produk unggulan.	tidaknya mengikuti kegiatan promosi, level pemasaran yang diikuti, serta cara penjualan produk IKM.[42]	memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Pada penelitian terdahulu oleh Rahmat Adriyan Us dilakukan di kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten Muna.
3.	Pramita	Strategi	Penelitian ini	Dalam penelitian ditemukan	Perbedaan dari penelitian

[42]http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=78876&obyek_id=4

	Putri Oktavia	Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) (Studi Deskriptif Tentang Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Pengembangan Industri Kerajinan	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik	bahwa strategi yang digunakan Disperindag dan Koperasi Kab. Banyuwangi dalam memberdayakan IKM anyaman bambu yang ada di sentra industri kerajinan anyaman bambu Desa Gintangan dan Kelurahan Gombengsari adalah pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam masyarakat	terdahulu yang di lakukan oleh Pramita Putri Oktavia, Mahasiswi Universitas Airlangga, dengan judul penelitian Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi terhadap para pelaku industri kerajinan anyaman bambu tersebut. Berbeda dengan

		Anyaman Bambu Di Desa Gintangan Dan Kelurahan Gombengsari Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Banyuwangi)	penentuan informan dengan purposive sampling, Dalam hal ini pelaksana stretegi pemberdayaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten	sekitar. Kualitas produk yang baik diharapkan dapat meningkatkan permintaan pasar. Namun meningkatnya permintaan pasar menjadi kendala dalam perkembangan sentra tersebut. Hal itu dikarenakan kurangnya tenaga terampil yang membantu pemilik industri dalam memenuhi permintaan pasar.[43]	penelitian yang saya lakukan yang akan menganalisis bagaimana rencana strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan industri kecil menengah dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah. Pada penelitian terdahulu oleh Pramita Putri Oktavia dilakukan di kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di kabupaten Muna.

[43] http://repository.unair.ac.id/16706/1/gdlhub-gdl-s1-2011-oktaviapra-20379-fisan5-k.pdf

			Banyuwangi. Validasi data dengan menggunakan triangulasi dan teknik analisis data berdasarkan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data		

2.3. Kerangka Pikir

Pemberdayaan pada dasarnya juga akan membawa masyarakat untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan adil, yang akan memberikan peluang hidup dan berkembang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan jangka panjang bagi kepentingan ekonomi secara keseluruhan dan masyarakat. Seperti kerangka pikir yang dikemukakan oleh Zubaedi yang menyatakan ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu, Pertama, menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. IKM menjadi sektor yang penting di Indonesia karena mampu

menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Selain itu, IKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekspor dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku cadang bagi perusahaan besar.

Pemberdayaan industri tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pembangunan serta pemberdayaan industri kecil dan industri menengah agar dapat mewujudkan industri yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja serta dapat menghasilkan barang dan jasa industri untuk dapat ekspor. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2014 pasal 72 bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta memberikan fasilitas bagi industri.

Sejalan dengan hal tersebut, maka IKM seharusnya didukung dengan adanya peran dari pemerintah daerah masing-masing dengan memperhatikan potensi dan keanegaraman daerah. Peran pemerintah daerah Kabupaten Muna dapat dilihat dari uraian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menguraikan serangkaian agenda yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan daerah khususnya IKM. Berangkat dari Renstra tersebut maka penulis akan melihat pelaksanannya melalui indikator pemberdayaan yang

dikemukakan oleh Zubaedi dikuatkan dalam UU No. 3 Tahun 2014 yang diuraikan melalui beberapa aspek, meliputi; Pertama, menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang melalui (1) peningkatan kemampuan sentra IKM, (2) peningkatan unit pelayanan teknis, (3) tersebarnya tenaga penyuluh lapangan, (4) adanya konsultan industri; Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui (1) kerjasama dengan bidang Pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelatihan, (2) memberikan bantuan dan bimbingan teknis, (3) menyediakan bahan baku dan bahan penolong, (4) adanya bantuan mesin atau peralatan, (5) memberikan informasi terkait perkembangan pasar, promosi dan pemasaran dalam lingkup lokal maupun nasional, (6) pemberian modal usaha, (7) kemitraan; dan Ketiga, melindungi masyarakat melalui menciptakan kawasan industri hijau.

Peran dari pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam penyusunan dan pelaksanaan Renstra untuk pemberdayaan IKM dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Seperti yang dikemukakan oleh Yeti dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan dan partisipasi dari masyarakat. Untuk lebih jelas kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar bagan :
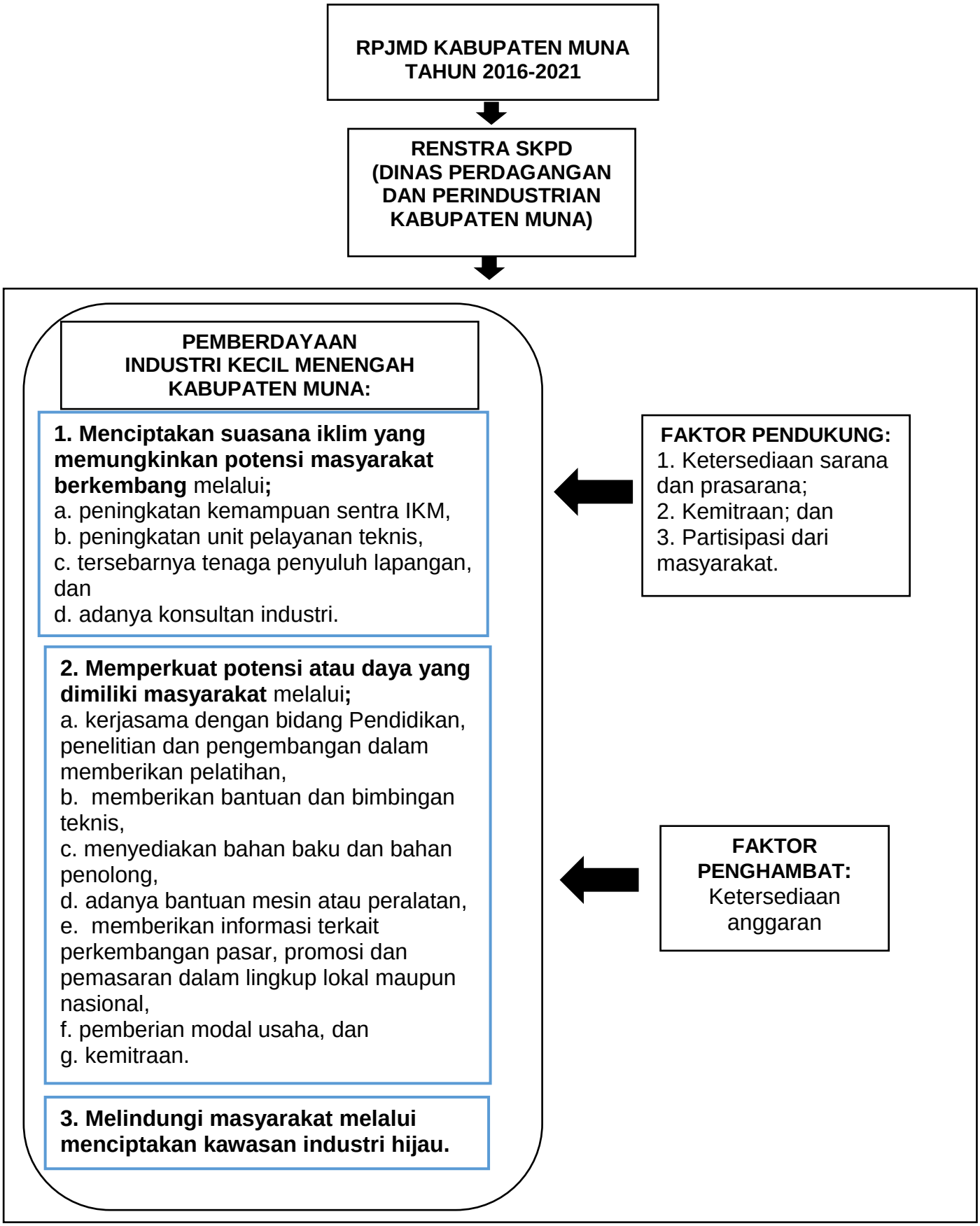
Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian